



Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun

Astrid Kinanti Putri^{1*}, Hendriyaldi², Ovie Yanti³

¹⁻³ Program Studi Manajemen Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: astridfc708@gmail.com

Abstract. *The empowerment of rural communities is a strategic effort to improve the well-being and economic self-reliance of communities in rural areas. One of the instruments developed by the government to support this objective is the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as economic institutions managed by the village and the community in a participatory manner. This study aims to analyze the role of BUMDes in Semaran Village, Pauh Subdistrict, Sarolangun Regency, in empowering the rural community through the management of local potential, the development of productive business units, and the increase in community income. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and analysis of various business programs run by BUMDes. The results indicate that the Semaran Village Government plays a crucial role as a facilitator, initiator, mentor, and supervisor in the management of BUMDes Maju Bersama. The village government is involved in providing initial capital, institutional development, and training to enhance community capacity. Supporting factors for success include Village Fund support, visionary leadership from the Village Head, and active community participation. The main challenges faced include limited capital, a lack of business innovation, low human resource capacity, and limited market access. However, with effective and sustainable management, BUMDes have the potential to serve as a driving force for rural economic development as well as a means of inclusive and sustainable community empowerment.*

Keywords: *Community Empowerment; Local Economic Development; Rural Development; Village Government; Village-Owned Enterprises.*

Abstrak. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Salah satu instrumen yang dikembangkan pemerintah dalam mendukung tujuan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh desa dan masyarakat secara partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes di Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dalam memberdayakan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal, pengembangan unit usaha produktif, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan analisis terhadap berbagai program usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Semaran berperan penting sebagai fasilitator, penggerak, pembina, dan pengawas dalam pengelolaan BUMDes Maju Bersama. Pemerintah desa berperan dalam penyediaan modal awal, pembinaan kelembagaan, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan meliputi dukungan Dana Desa, kepemimpinan Kepala Desa yang visioner, dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan modal, kurangnya inovasi usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya akses pasar. Namun, dengan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, BUMDes berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Pembangunan Pedesaan; Pemberdayaan Masyarakat; Pemerintahan Desa; Pengembangan Ekonomi Lokal; Usaha Milik Desa.

1. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu instrumen vital yang dapat menunjang peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa di era globalisasi dan pertumbuhan teknologi yang canggih. BUMDes hampir mirip dengan peranan BUMD yang dimiliki daerah karena dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, memberdayakan desa sebagai wilayah otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa (Adrian et al., 2023). BUMDes didirikan dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa, menumbuhkan pendapatan asli desa dan menyediakan lapangan kerja yang nantinya dapat berkontribusi langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Sari et al., 2024). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan menumbuhkan pendapatan masyarakat desa dan menekan ketergantungan pada sektor ekonomi eksternal (Sari et al., 2024). Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan memajukan potensi ekonomi yang terdapat di desa, seperti pertanian, kerajinan tangan, pariwisata dan jenis usaha mikro lainnya. Pengembangan ekonomi lokal akan membuat lapangan kerja baru dan berpotensi membuka peluang usaha yang lebih stabil.

Penciptaan lapangan kerja yang diberikan dari akses yang lebih besar oleh BUMDes, akan membawa langkah yang lebih dalam untuk menekan angka pengangguran di desa (Sari et al., 2024). Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan pendapatan, tetapi juga memberi peluang kepada masyarakat untuk berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi desa secara menyeluruh. Percepatan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan usaha yang menguntungkan (Sari et al., 2024). Dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan, BUMDes akan mendorong praktik usaha yang ramah lingkungan dan sosial, sehingga tidak hanya memberi keuntungan secara ekonomi, tetapi juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat kohesi sosial di dalam masyarakat. BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang memberikan kekuasaan, sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri (Afriansyah et al., 2023). Melalui BUMDes, masyarakat dapat mengelola potensi lokal, meningkatkan ekonomi desa, dan memperkuat solidaritas sosial. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan ekonomi keluarga, terbukti mendorong masyarakat untuk membangun potensi diri dan lingkungan (Hidayat & Tandilangi, 2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan potensi lokal. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, undang-undang ini mendorong terciptanya inisiatif yang

dapat meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan sosial dan budaya.

Di era globalisasi, desa tidak hanya bersaing dengan daerah lain di dalam negeri, tetapi juga bersaing dengan pasar internasional. Oleh karena itu, BUMDes harus mengadopsi pendekatan inovatif supaya dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan yang ditawarkan. Salah satunya adalah inovasi digitalisasi dan transformasi teknologi. Inovasi ini memiliki peran penting untuk peningkatan efisiensi dan transparansi operasional BUMDes dengan lebih efektif (Sari et al., 2024). Inovasi BUMDes melalui kolaborasi dan diversifikasi usaha sangat juga berguna untuk memperkuat kapasitas pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan (Sundari et al., 2024). Diversifikasi unit usaha juga menjadi strategi yang efektif untuk memperluas sumber pendapatan BUMDes dan memperkuat ketahanan ekonomi desa (Administrator Bidang, 2024). Dengan pengembangan di berbagai unit usaha, seperti pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, dan pengembangan produk lokal, BUMDes dapat menekan ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja. Diversifikasi ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memunculkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Banyak desa yang telah mempunyai BUMDes, tetapi tidak semua BUMDes berhasil berinovasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Pengelola BUMDes umumnya kurang memahami inovasi dan tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang konsep sebuah inovasi (Jayadi et al., 2024).

Pemerintahan Desa Semaran Kecamatan Pauh telah melibatkan masyarakat melalui program budidaya jagung dan juga budidaya perikanan. Program budidaya jagung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat desa. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa, kelompok tani, dan lembaga desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lihat gambar berikut :



Gambar 1. Budidaya Jagung dan Perikanan.

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025.

Jagung dipilih karena merupakan komoditas pangan dan pakan yang memiliki permintaan pasar yang tinggi serta relatif mudah dibudidayakan di berbagai kondisi lahan. Namun dikarenakan program ini dijalankan melalui kelompok tani dan BUMDes, sehingga tantangan pengelolaannya juga cukup kompleks, misalnya masih menggunakan metode pertanian tradisional sehingga produktivitas jagung kurang optimal. Kurangnya pelatihan mengenai teknik budidaya modern, penggunaan benih unggul, pemupukan, dan pengendalian hama juga dapat menyebabkan hasil panen yang rendah. Selain itu petani sering bergantung pada tengkulak sehingga harga jual jagung menjadi rendah dan tidak stabil.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan atau *empowerment* dalam bahasa Inggris merupakan sebuah konsep yang dikenal pada akhir tahun 70-an di daerah Eropa Barat dan Amerika Serikat. Konsep ini terus berkembang hingga sekarang (Krüger, 2019). Pemberdayaan memiliki definisi sebagai proses aktif, intensional, dan berkelanjutan di mana individu atau kelompok mendapatkan kontrol atas hidup mereka, berpartisipasi aktif secara demokratis dalam kehidupan komunitas, serta mempunyai pemahaman kritis terhadap lingkungan mereka (Mouchrek & Benson, 2023). Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada individu atau kelompok dengan tujuan agar mampu menyelesaikan tugas dan mengambil keputusan yang dapat memberi pengaruh terhadap kehidupannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat memiliki arti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga supaya mereka dapat menentukan masa depan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya memberi pengaruh terhadap kehidupan kelompoknya. Robert Chambers juga memberi penekanan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan baru yang *people-centered*, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan (Afriansyah et al., 2023). pemberdayaan merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk memperbaiki sistem kelembagaan yang terdapat di masyarakat, dan juga berlaku bagi aspek-aspek lain di kehidupan masyarakat, perekonomian, lingkungan, komunitas serta kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan akan memberi pengajaran kepada individu atau kelompok tentang bagaimana mereka bersaing dalam lingkup aturan yang berlaku (Pakpahan et al, 2024). Upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga (3) tahap. Adapun tiga tahap tersebut adalah sebagai berikut: *enabling, empowering dan protecting* (Suaib, 2023).

Sedangkan BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan pembentukannya berdasarkan kebutuhan dan potensi (Hasanah et al, 2022). Selanjutnya, Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sensu et al., 2022). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tabalong Mati memberikan motivasi yang baik dengan meningkatnya produktivitas, kompetensi, konsep pemberdayaan yang partisipatif, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, serta memberikan keterampilan teknis (Saufiah et al, 2024). Selain itu, penelitian Silvianita et al. (2023) dengan judul Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mengoptimalkan Potensi Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Desa di Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan peningkatan kesadaran, pemahaman masyarakat tentang potensi desa, kebutuhan peningkatan kapasitas, dan pembentukan jaringan komunikasi sebagai langkah progresif menuju penguatan BUMDES. Penelitian Efendi (2019) yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, menunjukkan pemerintah desa melalui BUMDes melakukan kegiatan kerajinan menjahit dan bedah rumah. Kegiatan ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena sosial, budaya atau tingkah laku manusia secara lebih mendalam dalam konteks alamiah tanpa manipulasi (Nurrisa et al., 2025). Pendekatan penelitian ini berfokus kepada makna, pengalaman dan pandangan individu atau kelompok, tidak berpandangan kepada angka atau kuantitatif. Penyajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku (Haryoko et al., 2020). Dalam prosesnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi

yang sekarang ini terjadi. Prosedur pengumpulan data dapat mencakup wawancara, survei, observasi, atau kombinasi ketiganya. (Sugiyono, 2014)

Penelitian ini menggambarkan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Badan Usaha Milik Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermann.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Secara geografis Desa Semaran mempunyai luas wilayah 3.800 Ha dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani karet dan sawit. Keadaan topografi Desa Semaran merupakan daerah dataran rendah dan tinggi mempunyai iklim hujan dan kemarau. Kondisi ini membawa pengaruh langsung terhadap pola tanam perkebunan yang ada di Desa Semaran. Kebijakan pembangunan Desa Semaran merupakan bagian upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program. Adapun visi Desa Semaran “Terwujudnya masyarakat Desa Semaran yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pengelolaan potensi lokal dan partisipasi aktif seluruh warga”.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Semaran.

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	1.077 Jiwa
2	Perempuan	1.016 Jiwa
	Jumlah	2.093 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Semaran, 2025.

Oleh karena itu, demi terwujudnya visi tersebut, Pemerintah Desa Semaran berupaya memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang diusung oleh BUMDes. Berdasarkan analisis data dilapangan, peran strategis pemerintah desa dalam menginisiasi, mengelola, dan mengembangkan kegiatan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa dilatarbelakangi keinginan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang belum dikelola secara maksimal. Pemerintah desa memandang perlu adanya lembaga ekonomi desa yang dapat menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan dikembangkannya potensi desa yang ada masyarakat bisa mandiri dan ada sumber pendapatan bagi desa. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka terbentuk dan berjalannya BUMDes ini tidak terlepas dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan BUMDes dengan nama Maju Bersama, mulai dari musyawarah, penetapan pengurus, hingga pengesahan melalui Peraturan Desa.

- b. Memberikan dukungan modal dan sarana pendukung awal dari yang berasal dari dana Desa untuk kegiatan usaha seperti program budidaya jagung dan juga perikanan.
- c. Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa yang rutin dilaksanakan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan oleh BUMDes Maju Bersama.
- d. Selain itu, Pemerintah Desa juga berperan aktif sebagai pengarah dan pembina masyarakat dalam program yang dijalankan oleh BUMDes Maju Bersama.

Dengan terbentuknya BUMDes Maju Bersama di Desa Semaran pada tahun 2017 tersebut, maka peran pemerintah Desa Semaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu :

- a. Peran sebagai Fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa menegaskan bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan BUMDes Maju Bersama, mulai dari penyusunan struktur organisasi, penetapan pengurus melalui musyawarah desa, hingga penganggaran dana awal dari Alokasi Dana Desa sebagai modal usaha.
- b. Peran sebagai Regulator dan Pengarah Kebijakan. Bahwa pemerintah desa berperan sebagai pengarah kebijakan dan pembina masyarakat, dengan cara memprioritaskan tenaga kerja dari warga setempat dan pengelolaan berbasis masyarakat sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat terutama untuk program budidaya jagung dan sektor perikanan.
- c. Peran sebagai Pembina dan Pengawas. Dilakukan melalui koordinasi rutin dan evaluasi berkala, memastikan bahwa pengelolaan BUMDes Maju Bersama berjalan sesuai ketentuan dan transparan. Pengawasan yang dilakukan bersifat partisipatif melalui musyawarah desa.
- d. Peran sebagai Motivator dan Pendorong Partisipasi. Kepala Desa dan perangkat desa berperan sebagai motivator yang menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi desa. Motivasi dan dukungan moral ini mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan usaha desa dengan ikut bergabung dalam kelompok tani jagung.

Keberhasilan program BUMDes Maju Bersama dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran pemerintah desa tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Adapun faktor pendukung nyata yang teridentifikasi adalah :

- a. Dukungan dana dari pemerintah desa melalui alokasi Dana Desa yang menjadi modal dasar operasional BUMDes Maju Bersama.
- b. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan usaha desa, baik dalam bentuk keterlibatan sebagai tenaga kerja dengan bergabung dalam kelompok tani maupun dukungan moral melalui kegiatan kegotongroyongan.
- c. Kepemimpinan Kepala Desa Semaran yang visioner, mampu menggerakkan perangkat desa dan masyarakat Desa Semaran untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan BUMDes Maju Bersama.
- d. Potensi sumber daya alam desa menjadi faktor penting yang mendukung program BUMDes Maju Bersama. Desa Semaran memiliki potensi pertanian jagung, dan budidaya perikanan, serta perdagangan lokal yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekonomi desa.

Faktor lain yang disebutkan adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun yang memberikan pelatihan serta bantuan dalam penguatan kapasitas pengurus BUMDes Maju Bersama serta Kelompok Tani yang ada di Desa Semaran. Faktor-faktor ini menjadi penopang keberlanjutan kegiatan BUMDes Maju Bersama karena pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh sistem dan kelembagaan yang lebih luas.

Setiap program pemberdayaan masyarakat tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Demikian pula dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semaran, tantangan tersebut muncul baik dari faktor internal desa maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BUMDes Maju Bersama, antara lain :

- a. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes Maju Bersama adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan tentang pengelolaan usaha. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dan bahkan pengurus belum paham bagaimana cara mengelola usaha BUMDes secara profesional.
- b. Belum melek teknologi yang dapat dilihat dari kurangnya keterampilan pengurus dalam membuat laporan keuangan dan administrasi usaha yang masih dilakukan secara manual.

- c. Faktor pemasaran hasil usaha juga menjadi tantangan, karena produk BUMDes Maju Bersama belum memiliki jaringan distribusi yang luas dan masih terbatas pada pasar lokal, belum sampai ke luar daerah.

Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan yang berkelanjutan, program budidaya jagung dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Pemerintahan Desa Semaran dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui program BUMDes Maju Bersama tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, pembina, pengawas, dan penghubung antara masyarakat dan pihak eksternal. Meski masih terdapat kendala dalam hal SDM dan fasilitas, komitmen dan peran aktif pemerintah desa menjadi faktor utama yang mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan BUMDes Maju Bersama.

Namun demikian, tingginya dukungan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari alokasi dana desa yang dianggarkan untuk melaksanakan program yang telah dibuat oleh BUMDes Maju Bersama, pola kepemimpinan kepala desa yang sangat visioner, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta potensi pertanian jagung yang cukup kuat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Desa Semaran.

Tantangan yang harus diperhatikan adalah kapasitas sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pengurus BUMDes Maju Bersama serta kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, masih perlunya pendampingan dari pemerintah khususnya mengenai digitalisasi teknologi budidaya dan pemasaran, serta pengembangan akses pasar yang masih terbatas dan belum adanya sistem distribusi yang kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Keluarga Besar Diploma IV Manajemen Pemerintahan FEB Universitas Jambi. Untuk setiap kesempatan dan kemudahan yang telah diberikan, mengingat lokasi penelitian dan kampus yang sangat jauh, tentu ini bukanlah hal yang mudah. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi, bukan hanya sekedar sebuah tulisan, tetapi menyimpan banyak usaha dan doa sebagai bagian dari perjuangan hidup. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan segala sesuatu yang lebih baik, aamiin.

DAFTAR REFERENSI

- Administrator Bidang. (2024). BURSA: Inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Bringin. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi*.
- Adrian, Z., Setiawan, W. J., & Yanti, O. (2023). Pelatihan peningkatan kapasitas dan kreativitas pengurus BUMDes Desa Pasar Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 61–68. <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i2.96>
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). *Pemberdayaan masyarakat* (Pertama). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Efendi, A. (2019). Peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif (Konsep, teknik, & prosedur analisis)*. Badan Penerbit- Universitas Negeri Makassar.
- Hasanah, Andriyani, L., Purnamasari, O., Hakin, L., Izzatusholekha, Maisanti, K. N., Patrianti, T., & Sumarni, L. (2022). *Manajemen BUMDes untuk ketahanan ekonomi masyarakat* (L. Andriyani, Ed.; Cetakan Pe). UM Jakarta Press.
- Hidayat, E. Wahyu, & Tandilangi, A. H. (2024). Analisis kemandirian ekonomi warga dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) di Semper Barat. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(1), 19–26.
- Jayadi, H., Sarkawi, Kafrawi, R. M., Setiawan, A., & Rahmadani. (2024). Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan kemandirian desa. *Jurnal Komplikasi Hukum*, 9(2), 249–259.
- Krüger, A. (2019). The role of participation, empowerment and sustainable development in heritage studies and its corresponding disciplines. *International Summer Academy Cottbus*, July, 1–16.
- Mouchrek, N., & Benson, M. (2023). The theory of integrated empowerment in the transition to adulthood: Concepts and measures. *Frontiers in Sociology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.893898>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Pakpahan, H. T., Kurniasih, S., Heryadi, Y., Fauziah, A., Eka, A. P. B., Tahir, M. I., & Andayani, Q. (2024). *Konsep pemberdayaan masyarakat* (Cetakan Pe). CV HEI Publishing Indonesia.
- Sari, N., Wahida, A., Ayu, R., & Nor, D. (2024). Inovasi produk dan layanan BUMDes meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bunga Eja. *Dedication, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 57–71.
- Saufiah, R., Arpandi, & Hasbiyah, S. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 1(3), 634–644.

- Sensu, L., Tatawu, G., Dewa, M. J., Haris, O. K., & ... (2022). Kewenangan kepala desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah kepada masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 288–307.
- Silvianita, A., Ahmad, M., Rubiyanti, N., Alfanur, F., Pradana, M., Hendayani, R., Rachmawati, I., Pradana, M., Fakhri, M., Yunani, A., Dewi Kumalasari, A., Zahid, A., Bin Abu Sujak, A. F., Raja Razali, R. R., & Mangsor, M. (2023). Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan potensi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan potensi desa di Kabupaten Tasikmalaya. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 4(2), 105–112. <https://doi.org/10.24198/sawala.v4i2.50394>
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat* (U. Nain, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif* (K. R & D., Eds.).
- Sundari, A., Ainiyah, L., Haniyah, N. A., Putri, M., & Sari, D. (2024). Inovasi BUMDes dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Laren. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi (JPE)*, 3(2), 51–63.